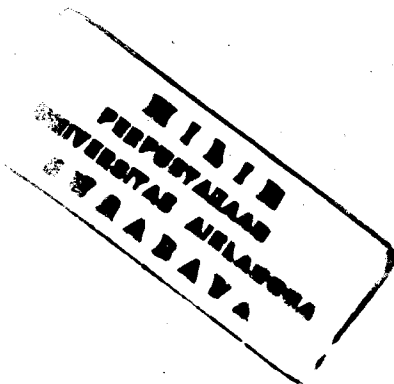


## BAB I PENDAHULUAN



### I. 1. Latar Belakang

Pergeseran politik sejak 21 Mei 1998 membuat perubahan signifikan pada perubahan dalam Gerakan Mahasiswa. Keberhasilan gerakan mahasiswa menggulingkan rejim Orde Baru tak lepas dari keberhasilan mahasiswa mengemas isu politik yang mempengaruhi opini publik masyarakat untuk bergerak bersama-sama melakukan perubahan sosial melalui aks-aksi massa. Masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, segera menyambut isu-isu politik yang ditawarkan mahasiswa. Isu politik yang menjadi tema gerakan inilah yang pada akhirnya menjadi kesadaran kritis masyarakat pada akar permasalahan yang melanda bangsa dan negara. Tidak bisa dipungkiri lagi, ketika para aktivis mahasiswa melakukan aksi-aksi yang berkenaan dengan kepentingan publik tersebut, masyarakat dengan serta merta memberikan dukungannya.

Ada beberapa isu yang menjadi tema sentral dalam gerakan mahasiswa 1998. Pertama, adalah isu ekonomi, menyangkut krisis moneter yang melanda Indonesia yang membuat harga-harga melambung tinggi, kurs mata uang Rupiah yang makin melemah, kenaikan tarif listrik dan sebagainya. Kedua, adalah isu tentang Korupsi, Kronisme, dan Nepotisme di seputar elit-elit politik rejim Orde Baru. Ketiga, adalah isu tentang gagalnya sistem Orde Baru yang lebih menekankan stabilitas politik demi pembangunan dan berlandaskan Paket 5 UU Politik, Dwifungsi ABRI, sentralisasi kekuasaan dan sebagainya. Menurut gerakan mahasiswa, berbagai permasalahan yang sangat kompleks

tersebut akarnya adalah kepemimpinan Soeharto. Kepemimpinan Soeharto-lah yang pada akhirnya menjadi target utama gerakan mahasiswa 1998.

Keberhasilan gerakan mahasiswa membentuk opini publik tersebut tak lepas dari dukungan pers sebagai media yang menyebarkan pesan politik mahasiswa kepada publik. Hanya saja peran pers bukan hanya sekedar menyampaikan realitas, karena pers juga niscaya bekerja pada kecenderungan atau keberpihakannya.<sup>1</sup>

Media massa, dalam konteks ini berfungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah yang independent dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.

Turunnya Soeharto sejak Mei 1998 lalu dan digantikan Habibie masih merepresentasikan keberlangsungan pola-pola pada rezim Orde Baru. Hal ini membuat Gerakan Mahasiswa tak tinggal diam untuk terus melakukan perlawanan sampai dengan PEMILU 1999 yang 'dianggap' mewakili suara rakyat berlangsung dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang memilih Abdurrachman Wachid dan Megawati sebagai pemimpin di negeri ini. Hanya saja sejak turunnya Soeharto yang menjadi target utama dan dianggap akar kesalahan dalam bernegara kali ini, Gerakan Mahasiswa juga mengalami perubahan-perubahan. Menurut Hermawan Sulisty, di kalangan mahasiswa muncul dua kubu yang memiliki visi berbeda dalam menentukan tujuan dalam gerakan mahasiswa, sehingga mengalami disorientasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta, LKIS, 2001, hal. xiv

<sup>2</sup> Hermawan Sulisty, *Gerakan Mahasiswa Di Persimpangan Jalan dalam Penakluk Rezim Orde Baru* Gerakan Mahasiswa 1998, Muridan S. Widjojo et al. hal. 376

Sebagian mahasiswa langsung menolak penyerahan 'jabatan' kepresidenan dari Soeharto ke Habibie. Sebagian lagi menerima penyerahan tersebut secara bersyarat dan memberi waktu bagi Habibie untuk menjalankan proses reformasi. Sebagian lagi langsung mendukung naiknya Habibie ke kursi kepresidenan. Konvergensi ketiga sikap inilah yang membuat mahasiswa 'kagok' dan berakibat redanya gerakan mahasiswa secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Pemilu 1999-pun juga meninggalkan berbagai catatan bagi gerakan mahasiswa. Hampir sama dengan cara pandang gerakan mahasiswa terhadap tampilnya Habibie sebagai penguasa. Perbedaan-perbedaan pendapat juga terjadi dalam menyikapi Pemilu 1999.

Sidang Istimewa 1998 dan dicabutnya Paket 5 UU Politik, membuka koridor politik dengan terbentuknya partai-partai politik dan agenda pemilihan umum beserta agenda-agenda pemerintah yang menyertainya, menggeser perhatian publik dari format gerakan mahasiswa ke format politik 'resmi'. Tak kurang 150 partai politik baru, sekalipun akhirnya hanya 48 parpol yang diperbolehkan ikut pemilu.<sup>4</sup>

Sebagian kalangan mahasiswa, sebagai bagian gerakan mahasiswa yang tak terpisahkan dari masyarakat, ikut tersedot ke dalam euforia politik formal ini. Sebagian lagi, yang jumlahnya makin mengecil, tetap meneruskan agenda gerakan mahasiswa "lama", yaitu menuntut pembentukan pemerintahan transisional di-Jakarta, suara paling jelas diungkapkan melalui tuntutan pembentukan Komite Rakyat Indonesia (KRI), oleh Forum Kota –dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, harus diakui bahwa

<sup>3</sup>. *Ibid* hal. 378

di dalam seluruh perkembangan baru kepolitikan nasional yang secara langsung menyurutkan gerakan mahasiswa ini, sebagian besar mahasiswa masih menunggu.<sup>5</sup>

Liberalisasi parpol menyebabkan banyak kampus tidak lagi netral dan bersifat non partisan, yang menjadi karakteristik utama gerakan mahasiswa. Bendera parpol mendominasi banyak kampus, sekalipun banyak pula yang berusaha bertahan tidak aktif dalam politik partisan ini. Menjelang pemilu 7 Juni 1999, berlangsung eskalasi kegiatan parpol, gerakan mahasiswa mereda. Banyak aktivis muda partai berasal dari kalangan aktivis gerakan mahasiswa. Dan seiring menjamnya polarisasi calon presiden antara BJ Habibie dengan Megawati Soekarnoputri merebak pula pertentangan antar aktivis gerakan mahasiswa pendukung keduanya. Di Jawa dan Sumatera mahasiswa banyak terlibat dalam kegiatan PDI-Petjuangan, di Ujung Pandang, para aktivis gerakan mahasiswa mendirikan 'posko-posko Habibie' di kampus-kampus utama gerakan mahasiswa, seperti Unhas dan UMI Ujung Pandang.<sup>6</sup>

Perbedaan-perbedaan pandangan tentang Pemilu 1999 maupun pasca Pemilu tetap berlangsung. Hal yang terjadi di kalangan mahasiswa ini juga terjadi di kalangan pers. Suksesnya Gerakan Mei 1998 membuat euphoria di kalangan pers. Bila sebelumnya di jaman Orde Baru, pers diposisikan subordinat dan berfungsi sebagai aparatus ideologi negara, pasca lengsernya orde baru pers tampil beda. Pers menjadi lebih agresif, dan kreatif dalam memberi nilai tambah suatu berita dan juga dalam mengeksplorasi isu-isu permasalahan untuk diolah menjadi "komoditas informasi".

---

<sup>4</sup> Hermawan Sulisty, op.cit. hal 380

<sup>5</sup> *ibid.* hal 381

<sup>6</sup> *ibid*

Perubahan kondisi ekonomi maupun politik pasca runtuhnya rejim Orde Baru pula mengakibatkan pergeseran persepektif pers dalam menangkap isu-isu yang dilontarkan gerakan mahasiswa sebagai "komoditas informasi" untuk membentuk opini publik. Tak bisa dipungkiri, meskipun rezim telah berganti dan iklim sudah terbuka. Faktor-faktor eksternal dalam media juga perlu diperhatikan, seperti pengaruh kapital maupun pasar. Sejumlah isu-isu yang dilontarkan gerakan mahasiswa menyangkut kepentingan publik belum tentu 'layak muat' untuk menjadi komoditas bila tidak sesuai dengan pasar media.

Pergeseran politik di Indonesia sejak Mei 1998 juga banyak dipahami sebagai bagian pergeseran lebih besar, yakni revolusi kapitalisme global yang bersumber pada kaidah-kaidah neo liberalisme dan yang menghendaki liberalisme global. Hal inilah yang juga membuat perubahan-perubahan sosial yang mempengaruhi arah gerakan mahasiswa dan pers yang sebelumnya saling mendukung dalam menumbangkan rejim orde baru.

Kondisi seperti inilah yang membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan. Penulis menjadikan Pemilu 1999 sebagai titik awal karena merupakan pesta demokrasi pertama setelah tumbanganya rejim orde baru yang ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat maupun mahasiswa yang berada dalam lembaga-lembaga pemantau Pemilu.. Hal inilah yang hendak penulis kaji lebih jauh.

## **1.2. Permasalahan**

Dengan pemikiran tersebut di atas, muncul suatu permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, yakni :

1. Perubahan-perubahan isu apa yang terjadi dalam gerakan mahasiswa pasca Pemilu 1999 ?
2. Inventarisasi faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan isu dalam gerakan mahasiswa pasca Pemilu 1999 ?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran secara jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam gerakan mahasiswa Pasca Pemilu 1999 dan apa yang menyebabkan proses tersebut bisa terjadi.

### **I.4. Kerangka Teoritik**

Membahas gerakan mahasiswa tidak akan lepas dari paradigma konflik yang berakar pada tradisi Marxian, dimana konflik dipahami sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam realitas sosial masyarakat. Perubahan politik di Indonesia pada Mei 1998 juga tak lepas dari peran gerakan mahasiswa dan media massa. Mencermati hubungan dari beberapa elemen itulah penulis perlu untuk menggunakan beberapa teori untuk menganalisa perubahan isu sentral dalam gerakan mahasiswa yang termuat dalam media massa pasca Pemilu 1999.

#### **I.4.1. Teori Konflik**

Dalam teori ini, konflik dipahami tidak lagi berkonotasi negatif, melainkan konsekuensi logis dari kehidupan sosial maupun politik masyarakat. Menurut Marx, masyarakat tersusun dalam kelas-kelas. Kelas merupakan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terutama dibedakan satu sama lain oleh posisi mereka secara historis ditentukan dalam sistem produksi.

Di dalam sistem produksi, kelas-kelas menempati posisi yang saling bertentangan satu sama lain. Posisi ini ditentukan oleh relasi mereka terhadap alat produksi. Relasi-relasi ini adalah relasi penghisapan, dominasi dan penundukan. Hal ini disebabkan kelas yang berkuasa memonopoli alat-alat produksi yang menentukan.<sup>7</sup>

Perjuangan kelas muncul dari posisi yang berhadap-hadapan secara diametral dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dari kelas yang berbeda. Kepentingan kelas tidak ditentukan oleh kesadaran kelas tetapi juga ditentukan posisi dan peranannya dalam sistem produksi sosial. Kepentingan kelas proletar adalah menghapus kepemilikan pribadi. Borjuasi dan proletariat adalah kelas-kelas yang antagonistik karena kepentingannya yang berlawanan.

Jika pertentangan dan perbedaan kepentingan kelas merupakan basis bagi perjuangan kelas, maka kesamaan kepentingan kelas-kelas yang berbeda membuka kemungkinan kerjasama. Dalam situasi-situasi tertentu, khususnya pada era kapitalisme kontemporer, dapat dilihat kondisi-kondisi yang memungkinkan aksi gabungan antara kaum proletar dan barisan kelas menengah di desa dan kota untuk melawan kelompok monopolis. Dalam perjuangan kelas, kepentingan dari berbagai kelas sosial yang

bertentangan secara radikal dimungkinkan untuk dipertemukan sementara jika menghadapi musuh bersama.<sup>8</sup>

Perjuangan kelas berperan sebagai motor penggerak perkembangan sejarah karena ia merupakan alat transformasi sistem sosial yang usang menjadi sistem sosial yang baru dan lebih tinggi. Konflik terjadi antara kekuatan-kekuatan produksi yang baru dengan relasi-relasi produksi yang sudah usang dan tercermin dalam antagonisme antar kelas. Konflik ini kembali diselesaikan melalui sebuah revolusi sosial, yang merupakan manifestasi perjuangan kelas yang tertinggi.

Bentuk-bentuk perjuangan kelas sangat berkaitan erat dengan bentuk organisasi kelas. Kelas buruh sendiri menjalankan perjuangannya menentang kapitalisme dalam 3 bentuk, yaitu ekonomi, politik dan ideologi.<sup>9</sup>

Secara historis, perjuangan ekonomi merupakan bentuk pertama perjuangan kelas proletar. Di semua negara, perjuangan buruh biasanya dimulai dengan perjuangan mempertahankan kepentingan ekonomi sehari-hari mereka. Mereka memperjuangkan kenaikan upah, pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja dan sebagainya. Perjuangan ini tidak hanya untuk meniadakan proses pemiskinan, namun juga memberikan wadah organisasi yang memiliki tujuan lebih luas.

Bentuk kedua adalah perjuangan politik yang merupakan bentuk tertinggi dari perjuangan menentang borjuasi. Tujuannya adalah jelas membuka jalan bagi

---

<sup>7</sup>. D. Lorimer, *Klas-klas sosial dan Perjuangan kelas*, diambil dari bahan-bahan Pendidikan Politik PRD

<sup>8</sup> *ibid*, hal 7

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 8



pembebasan sosial melalui penghapusan sistem penghisapan kapitalis. Polanya mulai dari demonstrasi massa, pemogokan politik maupun perjuangan parlementer.

Ketiga adalah perjuangan ideologis, yang bertujuan membebaskan kesadaran kelas proletariat dari prasangka-prasangka borjuasi. Perjuangan politik melalui parlemen memiliki peran sangat penting. Melalui partai-partai politik, perjuangan kelas tersebut diharapkan dapat mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelas dan diharapkan mampu memimpin perjuangan mereka. Organisasi-organisasi seperti serikat buruh, kelompok kebudayaan dan sebagainya memang diperlukan, hanya saja organisasi ini tidak akan mampu memecahkan masalah ke arah perubahan sosial.

Perubahan yang diakibatkan konflik kelas dan perjuangan kelas jelas akan menimbulkan sebuah revolusi. Menurut Marx, revolusi ini sendiri dilancarkan melalui aksi kelas yang dipimpin kelas revolusioner yang mempunyai kesadaran diri.<sup>10</sup>

Sekali berhasil, revolusi akan menandai dimulainya transisi dari cara produksi dan bentuk kelas dominan yang lama kepada cara produksi yang baru, pola-pola hubungan sosial baru, bentuk-bentuk ideologi dan politik baru dan hegemoni kelas revolusioner yang baru menang. Dan ini akan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan perkembangan masyarakat selanjutnya. Jadi Marx melihat revolusi muncul karena adanya konflik kelas.

Tentang perubahan politik ini Lenin melihat Marx tidak menjelaskan siapa aktor-aktor real dalam revolusi proletariat. Marx tampaknya yakin bahwa kesadaran kelas saja cukup untuk menciptakan revolusi yang berhasil merebut kekuasaan dari kelas kapitalis.

---

<sup>10</sup> Skocpol, *op.cit*, hal. 6

Bagi Lenini, meskipun kelas proletar memiliki kesadaran revolusioner atau kesadaran, mereka harus ada yang menggerakkan.

Dari sini Lenin memperkenalkan konsep *vanguard* (pelopor) dalam terminologi komunis. Konsep ini adalah sekelompok kecil kaum elit proletar yang terdidik, memiliki kesadaran kelas sangat tinggi dan paling revolusioner. Pembentukan pelopor sebagai alat perjuangan komunis ini terbukti efektif dalam merebut kekuasaan. Lenin berhasil mencetuskan revolusi Sovyet dan menumbangkan negara Tsar tahun 1917 dan mendirikan negara demokrasi komunis pertama yang didasarkan pada doktrin-doktrin Leninisme dan Marxisme.<sup>11</sup>

Kepeloporan dalam konsepsi Lenin adalah kepeloporan politik bukan ideologi. Artinya mereka yang bisa dikategorikan pelopor adalah para pemimpin massa, bukan orang yang paling maju dalam teori ideologi. Sebab banyak orang yang maju dalam pemahaman teori ideologi tetapi tidak aktif dalam perjuangan yang pada akhirnya tidak bermanfaat bagi revolusi. Tentang teori ideologi, tugas partailah yang harus mendidiknya.<sup>12</sup>

#### 1.4.2. Teori Radikalisme Intelektual

Dalam konsep Lenin, Partai pelopor ini juga harus mempunyai program-program perjuangan yang lebih maju sehingga mampu mendorong peningkatan kesadaran massa. Dan yang terpenting adalah kesamaan pemahaman. Kesamaan pemahaman ini harus

<sup>11</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, Jakarta, Darul Falah, 1999, hal.241

<sup>12</sup> Muhammad Ma'ruf, *Tentang Kepeloporan Politik*, PEMBEBASAN, No.12/IV/Agustus 1999

muncul dari proses kesadaran secara demokratis yang menurut Lenin disebut Sentralisme Demokratik. Karena yang terpenting di atas segalanya adalah membangun kesatuan pemahaman. Semua tindakan harus dijalankan secara bersama-sama dengan 'isi kepala' yang sama.<sup>13</sup>

Dengan demikian, partisan potensial dari perjuangan kelas yang muncul mencakup para anggota intelegensia, yang sudah memiliki kesadaran kelas terlebih dulu dan mentransformasikan kesadaran tersebut pada kelompok lain, misalnya kaum buruh, pekerja magang dan sebagainya. Mengenai aliansi kaum intelektual dengan buruh ini Arkady Kremer dalam pamfletnya *On Agitation* (1893) memberi landasan strategis bagi gerakan sosial demokratis. Intinya adalah gerakan pemogokan merupakan "sekolah dasar" untuk melatih kaum buruh sosial demokrat. Perjuangan untuk tuntutan-tuntutan kecil dari buruh individual ini akan meluas menjadi konflik antara kelas buruh dengan kelas di atasnya. Titik kulminasinya menurut Kremer adalah tumbanganya Otokrasi. Tetapi, sementara kaum buruh belum cukup terorganisasi dan terdidik untuk menunaikan tugas ini harus dilakukan di front ekonomi.

Memang benar, gerakan pemogokan ini dipelopori oleh kaum intelektual, namun diingatkan untuk tetap merasakan denyut nadi massa dan hanya membantu membukakan kesadaran kelas buruh secara berangsur angsur. Karena pada hakekatnya, menurut Kremer, hanya kaum buruh sendirilah yang mampu menumbangkan rezim ini.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Robert Grim, *Intelektual dan Politik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hal. 15-16

Munculnya radikalisme intelektual ini sangat cocok dengan gambaran gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelas menengah dengan tingkat pendidikan tinggi relevan dengan gambaran Kremer. Sementara itu Robert Grim mengatakan untuk menjadi tetap radikal, kaum intelektual harus memiliki kekuatan untuk menanggulangi ketidakpuasan mereka.

Untuk menjelaskan pentingnya dimensi kekuatan dalam hubungan antara kaum intelektual dengan gerakan radikal, beberapa definisi perlu diberikan disini. Pertama, kekuatan dapat didefinisikan sebagai kapasitas yang ditentukan secara struktural untuk mengendalikan orang lain, dengan menetapkan isu-isu, memutuskan isu-isu manakah yang akan kontroversial dan dengan mengesampingkan konflik-konflik yang nyata maupun laten. Dengan demikian yang terpenting disini adalah pola-pola komunikasi, diskusi, dan sebagainya untuk membentuk opini sehingga bisa menggerakkan massa (buruh). Masalahnya, keberadaan kaum intelektual yang independent membuat organisasi gerakan ini sangat terbuka yang memungkinkan anggotanya keluar masuk secara bebas. Karena itulah menurut Daniel Brower (1975) gerakan revolusioner ini harus terus menerus dipasok dengan orang-orang baru yang hingga tingkat tertentu bebas dari daya tarik kesempatan kerjas dan dari penggunaan represi pemerintah.<sup>15</sup>

#### **I.4.3. Teori Gerakan Sosial**

Huntington mempunyai pendapat yang sama dengan Marx, dalam perjuangan kelas, kepentingan dari berbagai kelas sosial yang paling bertentangan secara radikal dimungkinkan untuk dipertemukan sementara dalam menghadapi musuh bersama. Satu

kelompok sosial dapat responsif melakukan kudeta atau kerusuhan, tetapi hanya gabungan kelompok saja yang dapat melancarkan revolusi. Revolusi ini tidak dengan sendirinya akan meruntuhkan kapitalisme ataupun kekuasaan kaum borjuis. Sebaliknya kaum borjuis pertama-tama akan benar-benar membersihkan dasar bagi kepentingan kapitalisme yang luas dan cepat. Mereka pertama-tama akan membuat kemungkinan bagi kaum borjuis untuk berkuasa sebagai sebuah kelas.

Meskipun demikian Lenin mengatakan, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa sebuah revolusi demokratik tidak akan menjadi kepentingan besar bagi kaum tertindas (massa rakyat, tani dan borjuis kecil revolusioner). Demikian juga, tidak berarti revolusi ini tidak akan dapat mengambil tempat, baik dalam bentuk paling maju bagi kapitalis besar dan tuan tanah yang tercerahkan maupun dalam bentuk yang menguntungkan bagi kaum tani dan pekerja. Ini yang menyebabkan revolusi borjuis dalam tingkat tertinggi juga menguntungkan rakyat.

Aliansi dalam revolusi borjuis demokratik mutlak diperlukan dalam kepentingan buruh. Semakin lengkap, semakin menentu dan konsisten, maka semakin meyakinkan kehendak perjuangan massa rakyat untuk melawan borjuasi dan demi sosialisme.

Dan Lenin melihat, *democrat borjuis* juga akan berdaya upaya untuk menghentikan laju revolusi demokratik agar jangan sampai massa menuntaskannya. Marxisme mengajarkan agar kaum buruh tidak menjauh dari revolusi borjuis, sekaligus jangan sampai kepemimpinan revolusi diambil oleh kaum borjuis. Tetapi sebaliknya

---

<sup>15</sup> Mradipto Kacasungkana, *Aksi Mahasiswa-Buruh, tentang Radikalisme Gerakan Mahasiswa Era*

mengambil yang paling bersemangat di dalamnya untuk melawan yang paling menentukan demi demokrasi massa yang konsisten agar revolusi bisa dibawa ke tujuannya.

Intinya adalah, hubungan kaum buruh revolusioner dengan kaum *democrat borjuis* kecil bisa berjuang bersama dalam melawan faksi yang hendak mereka gulingkan. Namun, kelas buruh revolusioner harus menentang kaum *democrat borjuis* dalam segala hal ketika mereka berusaha mengkonsolidasikan posisi mereka untuk meraih kepentingan-kepentingan sendiri.

Marx melihat upaya borjuis ini dan berpendapat agar tindakan buruh harus diarahkan agar situasi revolusioner tidak dipadamkan kembali oleh kemenangan yang baru saja dicapai. Buruh harus tetap menjaga agar situasi revolusioner ini terus hidup selama mungkin. Kepemimpinan borjuis harus dikendalikan selama dan setelah tahap perjuangan. Dan pada setiap kesempatan buruh harus mengemukakan tuntutan mereka sendiri berdampingan dengan tuntutan kaum demokrat borjuis. Revolusi demokratik memang akan melancarkan jalan kapitalisme. Hanya saja dengan kontrol yang kuat perkembangan kapitalisme ini juga merupakan jalan yang luas yakni demokrasi yang seluas-luasnya yang menguntungkan massa rakyat untuk berkuasa.

Pemikiran Marx-Lenin di atas juga berkembang dalam pemikiran-pemikiran Tom Bottomore dalam mengartikan Gerakan Sosial sebagai salah satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu, dan menempatkan dirinya

dalam perdebatan politik sehari-hari yang karenanya siap berperan serta di dalam kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi atau *riotous assemblies*.<sup>16</sup>

David F. Aberle merumuskan lain, dimana gerakan sosial didefinisikan dengan cara berbeda yakni, sebagai usaha terorganisir oleh sekelompok manusia untuk menimbulkan perubahan di hadapan tekanan manusia lainnya, dan dibedakan dengan usaha-usaha individu secara murni, juga dengan aksi kerumunan.<sup>17</sup>

Dengan demikian gerakan sosial bisa dibedakan secara tegas dengan kerumunan massa dalam pandangan psikologis, yang melihat aksi massa sebagai kelompok yang irasional dan tidak terorganisir karena pengaruh emosi massa yang lebih dominan.

Uraian lebih dalam dikemukakan Alain Tourine dan Manuel Castell dari French School. Sekolah Perancis ini mengkonseptualisasikan gerakan sosial sebagai suatu fenomena yang awalnya lahir dari spontanitas. Tetapi spontanitas tersebut tidak berhenti sebagai suatu gerakan yang statis, justru sebaliknya menjadi oposisi spontan yang berkembang menjadi gerakan yang lebih besar dan terorganisir serta mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam pertarungan di tingkat opini dan kebijakan publik. Tourine dan Castell mengakui adanya rasionalitas pada individu-individu yang tergabung di dalamnya.<sup>18</sup>

Konsep Gerakan Sosial menurut Tourine, dikerangka dalam istilah-istilah para anggota gerakan untuk mendefinisikan dan mengartikan aksi-aksi mereka sendiri.

Analisa ini akan berhasil jika :

<sup>16</sup> Tom Bottomore, *Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 29

<sup>17</sup> *ibid.*, catatan kaki no.3, hal 30-31

<sup>18</sup> Mradipto Kacasungkana, *op.cit.*, hal 22

1. Jika para aktor mampu mengidentifikasi “pertaruhan” di mana konflik akan menjadi terbuka, termasuk siapa yang menjadi lawannya (kelas atau lembaga sosial, bukan masyarakat atau negara).
2. Jika analisa itu sendiri dapat ditransformasikan ke dalam program aksi.<sup>19</sup>

Tourine juga menyatakan gerakan sosial juga mempunyai tiga dimensi yang perlu dilihat, yakni :

- a. Identitas (I), dimana para aktor gerakan sosial memaknakan karakteristik identitas dan otonomi gerakan mereka sendiri.
- b. Oposisi (O), sebuah batasan yang diberikan penentangannya;
- c. Totalitas (T), suatu keadaan dimana gerakan sosial dan para penentangannya berada dalam situasi konflik.

Ketiga dimensi ini harus berada dalam situasi yang integrated agar gerakan menjadi kuat. Sebaliknya, jika ketiga komponen I-O-T ini terpisah-pisah, kapasitas gerakan menjadi lemah. Dengan kata lain, Tourine menegaskan , tidak ada sebuah gerakan yang solid jika tidak dibangun di atas dasar yang luas dengan otonomi besar serta pada saat yang sama berusaha keras untuk memunculkan tingkat oposisi yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Tourine juga mencatat adanya tiga fungsi dari sebuah gerakan sosial, yakni fungsi mediasi (*mediation*), penekan (*pressure*) dan penjelasan tentang kesadaran kolektif (*clarification of collective consciousness.*). Mediasi berarti bahwa gerakan social adalah



suatu mekanisme yang melibatkan individu dengan masyarakat yang lebih besar, dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mengemukakan ide-idenya dan mempunyai pengaruh atas tatanan social. Fungsi penekan berarti bahwa gerakan sosial hampir selalu memunculkan kelompok-kelompok yang terorganisasi yang mencoba mempengaruhi berbagai kebijakan, baik melalui lobby-lobby, penyebaran pamflet atau mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi.

Fungsi terpenting gerakan sosial adalah menjelaskan kesadaran kolektif. Hal ini sama seperti dikemukakan Marx maupun Lenin, sebelum melakukan perjuangan revolusioner, anggota-anggota kelas harus sadar atas kepentingan bersama dengan menginterpretasikan hubungan sosial secara lebih jelas dengan mencatat fakta-fakta yang terlupakan sebelumnya.

#### 1.4.4. Perubahan Politik

Menurut Ramlan Surbakti, Politik merupakan interaksi pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>21</sup> Dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama tersebut, seringkali muncul konflik antara berbagai pihak. Dan menurut sejumlah

<sup>19</sup> Heru Hendratmoko, *Gerakan Mahasiswa di Indonesia, tentang Pergeseran Orientasi Gerakan Mahasiswa 80-an/90-an*, Skripsi FISIP Universitas Airlangga, 1992, hal 33-34.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal.36-37

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992, hal.2

ilmuwan, konflik kepentingan diantara berbagai kelompok (kelas ataupun asosiasi) adalah penyebab utama perubahan politik<sup>22</sup>

Perubahan merupakan hasil interaksi kepentingan yang secara ketat dikontrol, bahkan ditentukan oleh posisi atau kondisi materiil yang terlibat. Menurut segi luas-mendasarnya perubahan yang terjadi, perubahan politik dibedakan menjadi tiga. Pertama adalah perubahan sistem, perubahan yang bersifat radikal (perubahan dengan akar-akarnya) karena tidak saja struktur dan strategi kebijakan yang berubah, tetapi juga sistem nilai politik.

Perubahan ini biasanya dicapai melalui revolusi, yaitu kegiatan kolektif warga yang sedikit banyak bersifat kekerasan untuk mengganti sistem politik yang ada dengan sistem baru yang dianggap lebih baik.

Perubahan politik seperti di atas tak bisa lepas dari pemikiran Strukturalis-nya Marx. Menurut kaum Marxis, negara dikendalikan kelompok yang paling dominan di masyarakat. Kelompok atau kelas dominan ini secara terus menerus akan menduduki posisi dominan tersebut. Dalam negara kapitalis, kelas borjuislah yang menjadi kelompok dominan, dan kelas inilah yang akan mengendalikan negara.

Bagi Marx, perubahan politik yang mendasar pada negara hanya bisa terjadi kalau yang diubah adalah sistem ekonomi-politik atau *mode of production*-nya. Perubahan kondisi struktural yang meliputi perubahan pada pengaturan sistem kekayaan dan pakta dominasi. Hanya saja, ini sulit terjadi dan memakan waktu yang lama. Kalau mau perubahan yang tuntas, bukan saja sistem ekonomi politik dalam

---

<sup>22</sup> *ibid.* hal. 246

negeri yang diubah tetapi juga di dunia internasional. Kalau hal ini terjadi, dengan sendirinya perubahan aparat birokrasi (terutama aliasninya dengan kekuatan sosial yang ada) dan perubahan kebijakan negara akan terjadi pula. Tentang perubahan rejim, demokratis atau otoriter masih tergantung faktor-faktor lainnya.<sup>23</sup>

Pemikiran ini dikembangkan Fernando H. Cardoso dan Enzo Falleto ketika dia menjelaskan bagaimana perubahan terjadi. Menurut mereka, ada dua variable yang menyebabkan perubahan yakni aktor manusia yang bebas yang melakukan tindakan-tindakan kolektif dalam bentuk gerakan-gerakan sosial, dan struktur sosial berupa kondisi yang membatasi. Faktor manusia dalam bentuk gerakan sosial memang bisa melakukan perubahan. Tetapi kondisi historis dalam bentuk struktur sosial membatasi pilihan-pilihan yang ada.

Untuk menjelaskan perubahan rejim, tak bisa lepas dari teori munculnya rejim otoriter atau demokratis. Ada dua model dalam pendekatan ini mengaitkan masalah otoriterisme dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pertama Guillermo O'Donnell mengemukakan konsep Negara Otoriter Birokratis. Model ini berkembang di negara dunia ketiga yang sedang melakukan pembangunan ekonomi substitusi impor. Rejim yang ada berseifit demokratis dan nasionalistis. Pemerintah lebih demokratis karena memperhatikan kebutuhan penduduk yang ada dibawah. Tetapi tarafperekonomian substitusi impor semacam ini pada suatu saat mencapai titik jenuh. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa ditingkatkan dengan ekspor, karena itulah kebijakan industri yang

---

<sup>23</sup> Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 102.

berorientasi ekspor harus segera dijalankan atau kalau tidak pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Upaya ekspor ini hanya bisa dilaksanakan dengan membuat komoditi yang bisa bersaing di pasar internasional, sekaligus akses perdagangan internasional, maupun modal berupa mesin-mesin industri yang lebih modern. Repotnya, hal ini tidak dipunyai negara dunia ketiga, karena itulah diperlukan kerjasama dengan modal dari pengusaha internasional.

Untuk mengundang investasi asing tersebut, dibutuhkan beberapa syarat yakni stabilitas politik di negara yang disinggahinya. Bila negara tersebut selalu diguncang pergolakan politik dan pemogokan buruh untuk menuntut kenaikan upah, investasi asing akan segan melakukan kerjasama dan menanamkan modalnya. Karena itulah pemerintah harus menegakkan stabilitas politiknya dan munculah rejim otoriter. Kalau pada waktu melaksanakan substitusi impor, pemerintah lebih berpihak ke bawah, ketika orientasi berubah menjadi ekspor, pemerintah lebih berpihak pada kaum pengusaha, pemilik modal yang memberikan akses ekspor dan internasional.

Model kedua diungkapkan Peter Evans, dalam teorinya Triple Aliansi antara Modal Asing, Pemerintah Dunia Ketiga dan Borjuasi Lokal. Kerjasama pemerintah dengan borjuasi lokal, lebih bersifat politis untuk menunjukkan nasionalismenya agar tetap berkuasa.

Seperti dikemukakan Alejandro Fortes, Nasionalisme memberikan basis ideologi bagi terselenggaranya akumulasi modal di negar tersebut, dan karena itu sangat berguna untuk berargumentasi melawan perusahaan-perusahaan multinasional. Nasionalisme juga memberikan legitimasi bagi birokrat pemerintah untuk menjalankan perannya di

mata borjuasi local. Nasionalisme juga merupakan satu-satunya basis dimana pemerintah dapat menyatakan kepada rakyat banyak bahwa mereka sedang menjalankan pembangunan nasional, yang hasilnya nanti akan dinikmati segala lapisan masyarakat.<sup>24</sup>

Negara memang makin otoriter (terutama terhadap kelas buruh), tetapi bersamaan dengan itu negara juga menjadi dangat nasionalistis, paling tidak dalam slogan, sambil terus bekerjasama dengan modal asing.

#### **I.4.5. Teori Media Massa**

Peran media massa dalam kehidupan sosial –menurut beberapa literatur- tidak diragukan lagi. Menurut McQuail dalam *Mass Communication Theories* (2000:66) merangkum pandangan khalayak tentang peran media massa. Setidaknya ada enam perspektif dalam hal melihat media.<sup>25</sup>

Pertama, melihat media sebagai *window on event and experience*. Kedua, media dianggap sebagai cermin dari peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya, yang menafikan peran pengelola media sebagai pengambil keputusan apa yang disajikan. Ketiga, memandang media massa sebagai filter yang menyeleksi hal yang perlu diberi perhatian atau tidak. Keempat, media massa dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidak pastian, atau alternatif yang beragam

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 115

<sup>25</sup> Henry Subijakto, *Menggagass sistem Media yang Demokratis untuk Indonesia Baru*, dalam Jurnal ISKI, Bandung, PT.Rosdakarya, 2001 hal. 10

Kelima, media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan baik. Keenam, media massa sebagai interlocutor yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Kesemuanya itu pada dasarnya ingin menunjukkan, peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana diversion, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran signifikan dalam prose sosial. Isi media merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subyektif pelaku interaksi sosial.

Gambaran realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respons dan sikap khalayak terhadap objek sosial. Media massa, dalam konteks ini berfungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah yang independent dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.

Tatanan politik di sebuah negara terbentuk dari berbagai macam unsur yang menggejala dalam realitas kemasyarakatan. Pers dengan berbagai aktivitas penyampaian pesannya hanyalah satu dari realitas politis. Brian McNair (1999), mengutip Habermas menyebutkan, banyak unsur yang dapat mempengaruhi media massa dalam mendorong lahirnya kekuatan opini publik. Peran media massa sebagai suatu mekanisme kontrol lewat pembentukan opini publik melalui transmisi pesan yang menjangkau khalayak banyak (publik).

Untuk menjelaskan peran media dalam penciptaan opini publik, tak bisa lepas dari beberapa pendekatan untuk menjelaskan isi media. Dalam studi media massa, ada 3 pendekatan untuk menjelaskan isi media. Pertama adalah pendekatan politik-ekonomi. Yang berpendapat isi media ditentukan oleh kekuatan ekonomi-politik di luar pengelolaan media. Pengelola media dianggap entitas yang pasif, yang dibatasi struktur-struktur ekonomi-politik di luar dirinya.

Kedua, adalah pendekatan organisasi yang melihat pengelola media sebagai entitas aktif, berita dianggap sebagai hasil mekanisme dari ruang redaksi. Ketiga adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural inilah yang penulis gunakan untuk menjelaskan bagaimana pergeseran-pergeseran isu yang terjadi dalam gerakan mahasiswa di media massa.

Pendekatan kulturalis ini merupakan gabungan dua pendekatan sebelumnya. Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut juga tidak bisa lepas dari kekuatan-kekuatan ekonomi-politik di luar media.<sup>26</sup>

## **I.5. Konseptualisasi**

### **I.5.1. Isu Gerakan**

Isu gerakan disini merupakan permasalahan yang dilontarkan gerakan mahasiswa menyangkut berbagai akar persoalan, misalnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan maupun hak asasi manusia. Isu ini dilontarkan untuk membuat opini publik agar

---

<sup>26</sup> Agus Sudibyo, op.cit hal.4

mendukung gerakan dalam memberikan tekanan pada pemerintah atau sekedar sampai tingkat kesadaran kritis pada masyarakat.

### **I.5.2. Gerakan Mahasiswa**

Sama seperti dikemukakan dalam kerangka teori, gerakan mahasiswa disini adalah gerakan yang dilakukan aktivis-aktivis mahasiswa yang muncul sebagai kaum intelektual dan menjadi pelopor dari gerakan sosial yang melakukan perlawanan terhadap sistem yang selama ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan-tujuan reformasi.

Bentuk-bentuk atau format gerakan mahasiswa tersebut bisa berupa aksi-aksi demonstrasi turun ke jalan, maupun bentuk lain berupa penyadaran melalui forum-forum diskusi atau kelompok-kelompok studi, penyebaran pamflet untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Fungsi gerakan disini sebagai komunikan politik yang menyampaikan gagasan-gagasan perubahan atau sekedar masalah publik.

### **I.5.3. Perubahan Politik**

Perubahan politik disini merupakan perubahan kebijakan, pergantian pemerintahan/rejim ataupun sistem negara. Perubahan-perubahan ini bisa ditentukan secara mandiri atau karena adanya kondisi struktural selama proses berlangsung. Perubahan kebijakan belum tentu diikuti dengan perubahan pemerintah atau rejim. Bahkan sebaliknya, perubahan rejim/pemerintahan seringkali dilakukan untuk membuat perubahan-perubahan kebijakan. Hal yang sama terjadi, perubahan dari rejim otoriter menuju demokrasi belum tentu merubah struktur negara, misalnya dari feodal menjadi kapitalis atau merubah pakta dominasi dalam negara.



Andrain membedakan perubahan sistem dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara progressif dan retrogresif. Perubahan progressif biasanya dilakukan oleh kelompok revolusioner untuk memperluas kesempatan dalam mobilitas sosial, melakukan sejumlah pertukaran posisi untuk menjamin kemanfaatan bagi kelompok yang tidak punya dan mengubah nilai-nilai dasar masyarakat sehingga kemampuan politik dan kesadaran ideologi menggantikan kualitas pribadi yang bersifat warisan.

Kedua adalah perubahan di dalam sistem, perubahan di dalam proses politik yang menyebabkan modifikasi dalam ketiga sistem politik. Artinya, sistem nilai, struktur kekuasaan dan strategi menangani proses kebijakan pada dasarnya tidak mengalami proses perubahan yang tidak berarti, meskipun pemimpin pemerintahan dan isi kebijakan umum mengalami perubahan. Tipe perubahan lainnya adalah berkaitan dengan dampak berbagai kebijakan pemerintah maupun sistem politik yang sudah berganti, apakah kebijakan tersebut mampu mengangkat kondisi dan kualitas hidup masyarakatnya atau justru sebaliknya.

Arah perubahan politik sendiri dapat dilihat dari tipe-tipe gerakan. Pertama adalah gerakan revolusioner yang menghendaki agar kelompok yang sebelumnya bangkit dalam sistem sosial dengan suatu proses perataan di bidang kekuasaan, kekayaan, prestise kelompok-kelompok sosial.

Kedua adalah gerakan reformis. Gerakan ini mencari peluang-peluang bagi individu-individu untuk memperoleh mobilitas sosial. Dalam gerakan ini, golongan konservatif mengusahakan perubahan-perubahan terbatas dalam sistem stratifikasi sosial, mereka hanya ingin melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil dalam proses yang digunakan untuk meraih prestise.

Ketiga adalah gerakan reaksioner, yang ingin memulihkan sistem stratifikasi yang kaku, elitis yang telah runtuh berusaha mengembalikan elit lama ke atas kekuasaan.<sup>27</sup> Gerakan mahasiswa yang menggulingkan Soeharto dari kursi kekuasaan merupakan salah satu bagian dari gerakan reformasi

#### **1.5.4 Media Massa**

Media massa disini adalah institusi pers yang memiliki peran menyajikan informasi pada khalayak. Dalam masyarakat demokratis, media massa adalah salah satu pilar yang harus ditegakkan. Sebagai media komunikasi, pers memiliki posisi sangat vital dalam membentuk wacana maupun kesadaran dalam masyarakat. Meskipun peran pers disini sangat vital, peran pers juga tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sehingga juga akan mempengaruhi pola penyajian informasi maupun isu (dalam hal ini isu-isu yang dibawa dalam gerakan mahasiswa) pada massa. Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada isu di beberapa media yakni Kompas dan Jawa Pos yang merupakan dua media besar yang memiliki penyebaran nasional.

### **1.6. Metode Penelitian**

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan desain kerangka teoritik yang sudah terbangun. Teori dari beberapa teoritis ini kemudian dikonstruksikan dengan problematika di lapangan untuk diteliti ulang, untuk menggambarkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada gerakan mahasiswa pasca pemilu 1999.

---

<sup>27</sup> Andrain, *op.cit.* hal 42

### 1.6.2 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bisa diperoleh dari mass media, dokumentasi, arsip maupun rujukan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti maupun wawancara dengan pelaku gerakan.

### 1.6.3 Tehnik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang fokus penjabarannya secara deskriptif, karenanya tidak perlu pengujian statistik. Dimulai dengan interpretasi data-data sekunder yang dikumpulkan baik berupa dokumen, media massa maupun buku-buku. Upaya ini dilakukan mengingat penelitian ini hanya mencoba memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1. Lokasi Penelitian  
- alasan pemilihan lokasi
2. Jenis Data yg. dibutuhkan
3. Teknik Sampling